



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 04 Juni 2021

Halaman: 2

DPRD DIY Dorong Pembentukan BUMD Parkir

YOGYA (MERAPI) - Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY, RB Dwi Wahyu mendorong Pemda DIY membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang fokus menangani permasalahan parkir di Yogyakarta usai terjadinya tarif parkir 'nuthuk' beberapa waktu lalu yang menimbulkan polemik di masyarakat.

Dia menilai sebagai kawasan pariwisata, permasalahan parkir di Yogyakarta tidak pernah selesai. "Menurutku sekarang pengelolaan parkir, bentuk aja BUMD. BUMD parkir itu cetho (jelas). Jadi apa, BUMD menggaji pegawai parkir jadi dia tidak diburu sebuah pendapatan, (tidak) menaikkan parkir seenaknya sehingga itu lebih terkontrol," tegasnya, Kamis (3/6) di DPRD DIY. "Kita ini kawasan pariwisata tapi namanya parkir belum terselesaikan," imbuhnya.

Menurutnya pembentukan BUMD parkir dapat dijadikan salah satu solusi yang jelas. Dengan begitu dapat dilakukan inventarisasi lahan parkir dan pembentukan tata ruang akan seperti apa. Dalam hal ini juga dapat mengandeng Dinas terkait. "Apakah diserahkan BUMD, itu salah satu solusinya. Kalo saya BUMD, jelas itu. Selanjutnya karena kita ini kawasan pariwisata di mana pun segera (atur) tata ruang. Menurut saya sekarang inventarisasi potensi parkir, kerja sama dengan tata ruang supaya tidak kaprakan (bertabrakan)," jelasnya.

Secara teknis, dia menyebut dapat dikelola oleh BUMD atau diserahkan langsung ke Kabupaten/Kota. Menurutnya parkir harus dikelola secara profesional baik penataan lahan parkir maupun tarifnya. "Dikelola oleh BUMD, persoalan kewenangan Kabupaten/Kota atau DIY teknis. Persolan sekarang pengelolaan, ada tempat parkir tapi tidak dikelola secara profesional sehingga terjadi apa yang kemudian diviralkan," ujarnya.

Sekali lagi, Dwi mengarisbawahi sebagai kawasan pariwisata sudah seharusnya seluruh komponen yang ada didalamnya baik infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia (SDM) dapat mencerminkan pariwisata yang baik. "Kita ini, sekali lagi basis pariwisata ketika mendeklarasikan berbasis pariwisata harus berperilaku wisata termasuk pelakunya, bagaimana Pedagang Kaki Lima (PKL) jangan aji mumpung, parkir jangan aji mumpung," jelasnya.

(C-4)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005